



Berbagi Peran Memberantas Korupsi

AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
DESA DI LINGKUP KABUPATEN CIREBON
Cirebon, 5-6 Agustus 2024

DANI RUSTANDI
Analisis Pemberantasan Tipikor Ahli Madya
Direktorat Pendidikan & Pelatihan Antikorupsi

RIWAYAT PEKERJAAN

DANI RUSTANDI

Penyuluh Antikorupsi Utama
Asesor Kompetensi LSP KPK
Analisis Pemberantasan TPK
Ahli Madya

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi RI)

- **2020-sekarang** : Koordinator Tim Bangkom Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi
- **2019-2020** : Ketua Tim Satgas Pendidikan Antikorupsi
- **2018-2019** : Tim Satgas Politik Cerdas Berintegritas
- **2015-2018** : Tim Satgas Unit Kerja Korsupgah
- **2005-2015** : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA

- **2003-2005** : Broadcasting Engineer

PENDIDIKAN

- S2, Ilmu Administrasi & Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Jakarta
- S1, Teknik Informatika, ISTA, Jakarta
- D3, Teknik Telekomunikasi, Politeknik ITB, Bandung



Sistematika Pembahasan



Potret Indonesia

.....>



Memahami Untuk Membasmi

.....>



Strategi Pemberantasan Korupsi

.....>



Peran Kita

.....>



Apa yang Anda pikirkan tentang
korupsi di INDONESIA?

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) 2023

Menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparency International Indonesia

Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah, sebaliknya skor IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi.



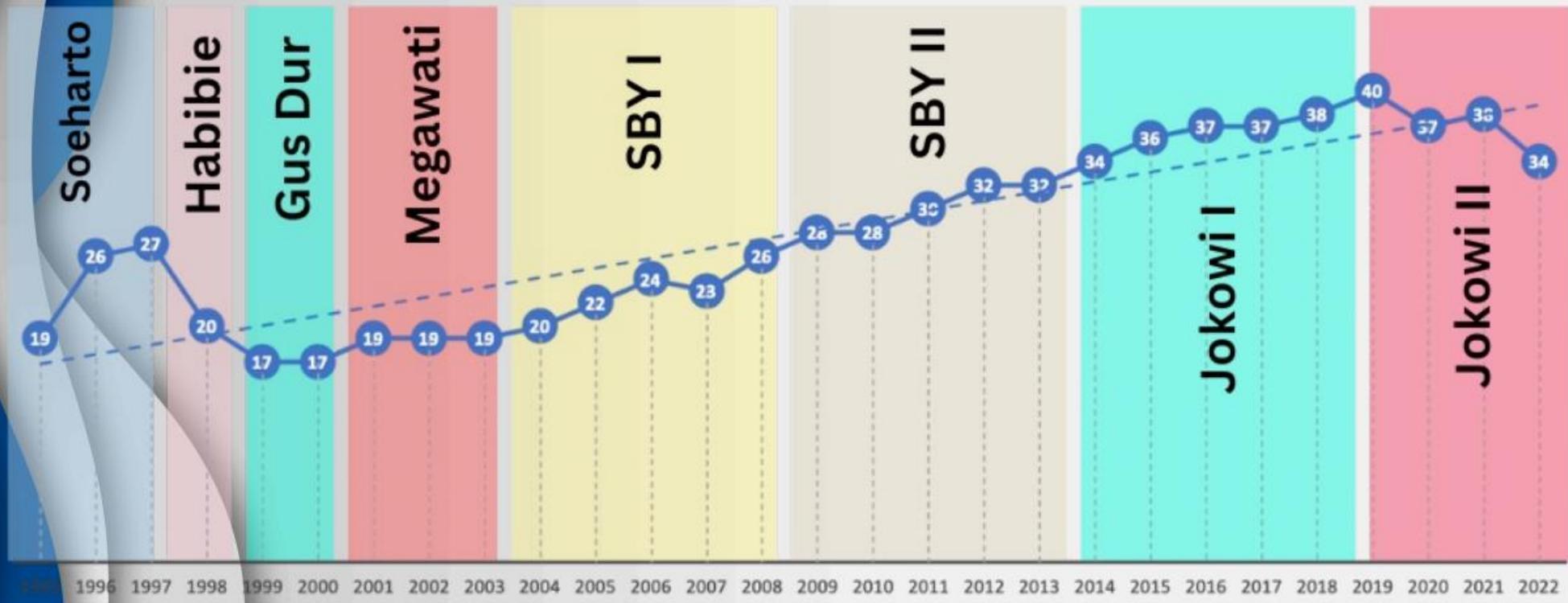
6 Negara dengan Nilai IPK Tertinggi



Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN



1995-2022 OF CORRUPTION





Masyarakat semakin
Permisif terhadap korupsi

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2024

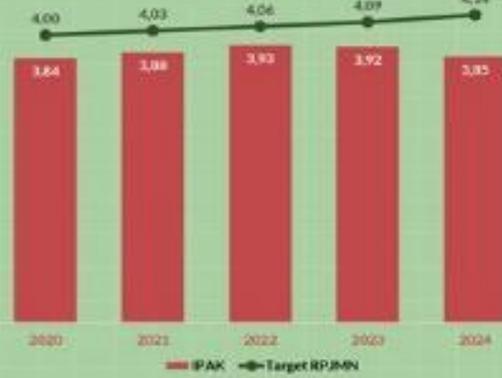
Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII, 15 Juli 2024



Perkembangan IPAK 2020-2024



Sangat antikorupsi



IPAK 2024 **3,85** ▼ 0,07 dibandingkan IPAK 2023

IPAK mengukur budaya *zero tolerance* terhadap korupsi skala kecil (*petty corruption*)

Nilai IPAK berada pada skala 0 (sangat permisif) sampai 5 (sangat antikorupsi).

IPAK 2024 Menurut Dimensi dan Subdimensi

DIMENSI PERSEPSI **3,76** ▼ 0,06

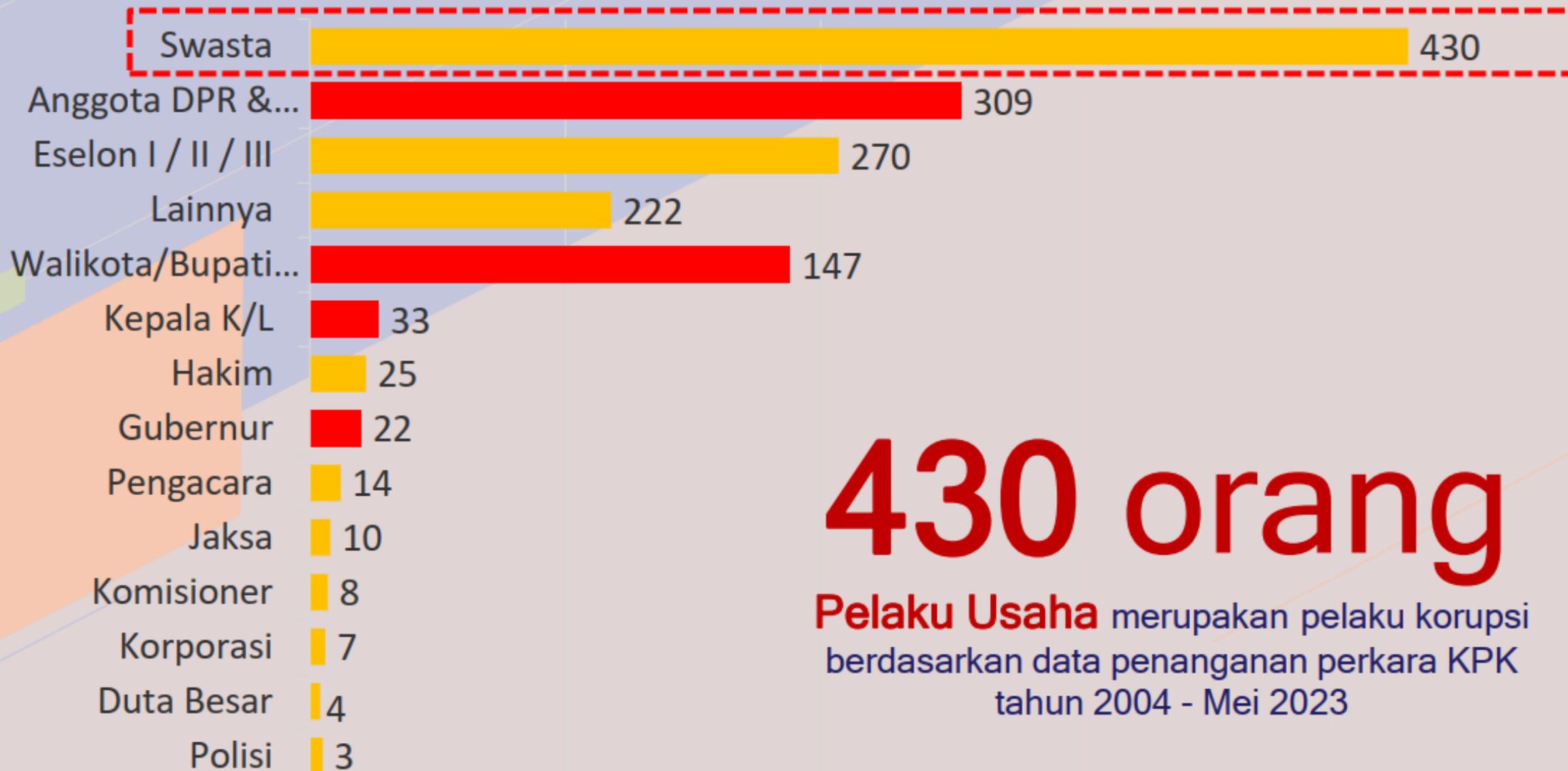


DIMENSI PENGALAMAN **3,89** ▼ 0,07



Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkara KPK berdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – 2023



430 orang

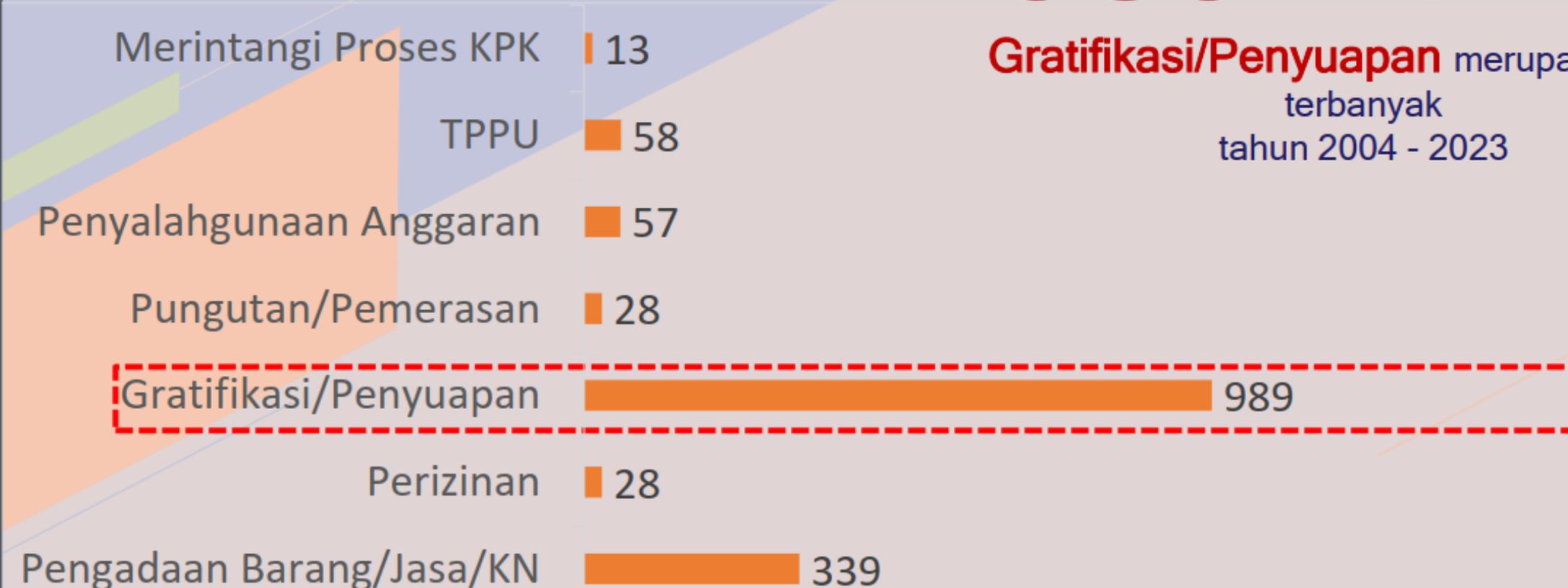
Pelaku Usaha merupakan pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004 - Mei 2023

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkara KPK berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2004 – 2023

989 Kasus

Gratifikasi/Penyuapan merupakan kasus terbanyak tahun 2004 - 2023





KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Realis..

- Agung Purno Sarjono (35 tahun)



- Fahd El Fouz (29 tahun)



- Wa Ode Nurhayati (30 tahun)



Generasi Muda Koruptor

- Muhammad Nazarudin (33 tahun)



- M. Faisal Azwan (31 tahun)



- Eka Dharma Putra (32 tahun)



Korupsi melibatkan keluarga dan sanak saudara serta kerabat dekat

Kompas.com / News / Nasional

KPK: Pelaku Korupsi Semakin Muda dan Melibatkan Keluarga

Kompas.com - 06/03/2019, 13:53 WIB



Komentar

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO

HOME NASIONAL

KPK Ingatkan Korupsi Bisa Berdampak hingga Keluarga Besar

Reporter: Antara
Editor: Eko Ari Wibowo

Jumat, 8 Oktober 2021 07:07 WIB

Monday, 12 Rajab 1443 / 14 February 2022

HOME NEWS NUSANTARA KHAZANAH ISLAM DIGEST INTERNASIONAL EKONOMI REPUBLIKBOLA LEISURE TEKNOLOGI

INDEKS

Home > News > Nasional

Pencucian Uang, Koruptor Libatkan Keluarga

Home > Nasional > Hukum Kriminal

Libatkan Keluarga, Tren Korupsi Mulai Bergeser

Tri Wahyuni | CNN Indonesia

Senin, 24 Aug 2015 01:01 WIB



Keluarga dan Korupsi (Bersama)



Dendy & Zulkarnain Djabar



Adriatma Dwi Putra & Ausrin



Ratu Atut & Wawan



Romi Herton dan Masyitoh



M. Kazaruddin & Neneng



Ade Swara & Hurlatifah



Gotot Pudjo & Evy Susanti

Ayah dan Anak

Kakak dan Adik

Suami dan Istri



DAFTAR JUAL BELI JABATAN PEMDA KLATEN YANG DIDAPAT KASN DARI LAPORAN MASYARAKAT



1. Eselon II (tergantung SKPD) :	Rp 60 juta-Rp 400 juta.
2. Eselon III golongan A :	Rp 40 - Rp 60 juta.
3. Eselon III golongan B :	Rp 30 juta.
4. Eselon IV golongan A :	Rp 15 juta.
5. Eselon IV golongan B :	RP 10 juta.
6. Tata Usaha (TU) Puskesmas :	Rp 5 juta-Rp15 juta.
7. Jabatan tetap (tidak mutasi)/(tertentu) :	Rp10 juta-Rp50 juta.
8. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) :	Rp 50 juta-Rp 100 juta.
9. TU UPDP :	Rp 25 juta.
10. Kepala Sekolah SD :	Rp 75-Rp 125 juta.
11. TU SD :	Rp 30 juta.
12. Kepala Sekolah SMP :	Rp 80 juta-Rp 150 juta.
13. TU SMP :	Rp 35 juta.
14. Guru mutasi (dalam kabupaten) :	Rp15 juta-Rp 60 juta.
15. Lelang jabatan pratama (masuk tiga nominasi dan terpilih):	Rp 75 juta-Rp 300 juta.

viva.co.id

BERITA BOLA LIFE BLOG OTOMOTIF VIDEO

VLOG

5 Pasangan Suami Istri Terlibat Korupsi di Indonesia

Banyak kasus korupsi di Indonesia kini melibatkan sang istri.

Oleh : Eko Nugroho, Mahesareny Sabtu, 1 Agustus 2015 | 09:06 WIB



LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

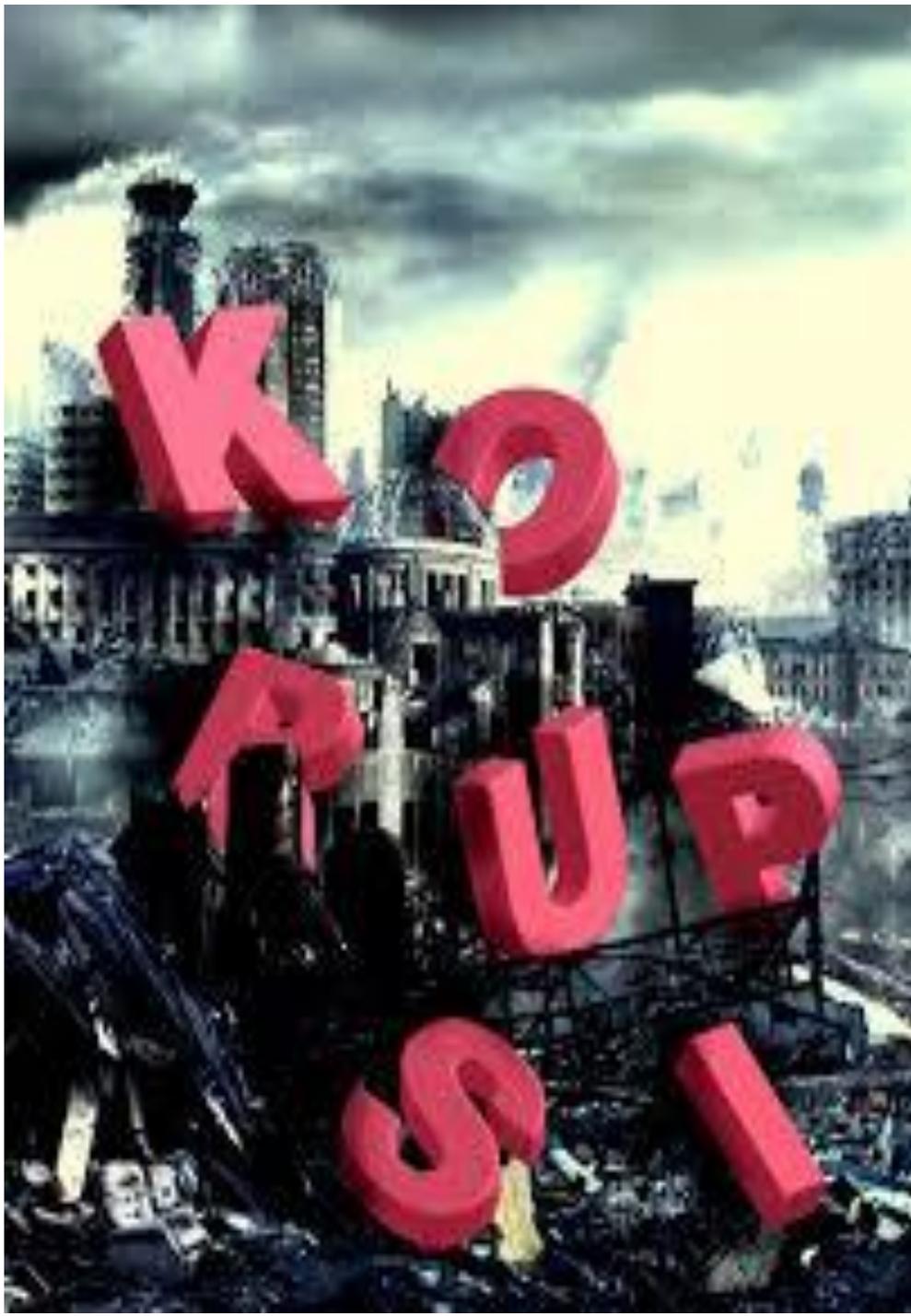
1. Eselon II (Kepala Dinas) :	Rp 400 juta.
2. Eselon III (Sek dan Bidang) :	Rp 100 juta-Rp 150 juta.
3. Eselon IV (Subbag dan Kasi) :	Rp25 juta.

Sumber: Reportase JawaPos.com

FAKTA INDONESIA?

- IPK cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun;
- Masyarakat menjadi semakin permisif terhadap korupsi;
- Telah terjadi regenerasi pelaku korupsi, Pelaku sudah menyentuh anak muda;
- Korupsi dilakukan secara berjama'ah, bahkan melibatkan keluarga;
- Korupsi menyentuh berbagai profesi dan jabatan;
- Korupsi sudah begitu massif dan parah. Tidak ada lagi sektor di negara yang tidak terasuki oleh korupsi, bahkan sektor-sektor yang dianggap paling suci sekalipun.





KORUPSI

adalah

KEJAHATAN

LUAR BIASA

Extra Ordinary Crime, secara umum memiliki ciri sebagai berikut:

1. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja;
2. *Random target/random victim*;
3. Kerugiannya besar dan meluas (*snowball* atau *domino effect*);
4. Sindikasi dan Transnasional

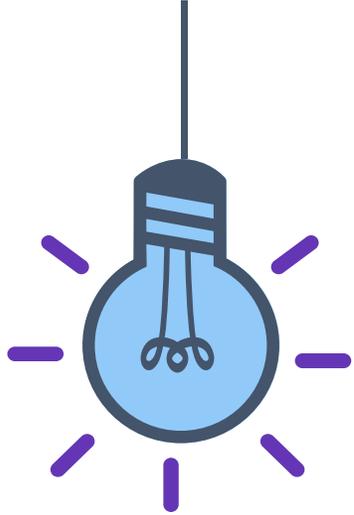


KORUPSI ITU APA SIH?

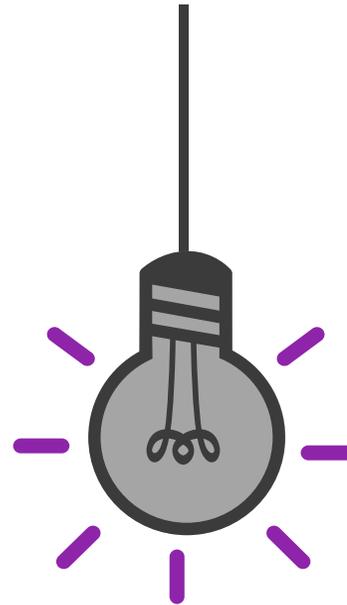
Pengertian KORUPSI

- *corruptio* atau *corruptus* (latin) → *korruptie* (Belanda) → korupsi (Indonesia)
- **Harfiah:**
Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral.
- **Kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta:**
Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb.
- Malaysia “*rasuah*” (korupsi), Arab “*riswah*” (suap), “*ghulul*” (korupsi), Thailand “*gin moun*g” (makan bangsa), China “*tanwu*” (keserakahan bernoda), Jepang “*oshuko*” (kerja kotor).

Pengertian Korupsi



Transparansi Internasional
Perilaku pejabat yang secara **tidak wajar dan ilegal memperkaya diri sendiri** dan orang yang dekat dengan dirinya dengan cara **menyalahgunakan kekuasaan publik** yang dipercayakan kepada mereka



UU nomor 31 Tahun 1999
Tindakan setiap orang dengan tujuan **menguntungkan diri sendiri** atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana** yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

JENIS TIPIKOR (UU 31/99 jo 20/2001)

30 Jenis/ 7 Kelompok Tipikor.



1 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2, Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)



4 PEMERASAN

Ps.12 e,f,g



3 PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Ps.8; Ps.9; Ps.10 a,b,c

3 PERBUATAN CURANG

Ps.7(1) a,b,c,d; Ps.7(2); Ps.12 h



5 GRATIFIKASI

Ps. 12 b jo Ps.12 c



6

SUAP-MENYUAP

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1) a,b;
Ps.6(2); Ps.12 c,d

Ps. 12i



TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI

1. Merintangi pemeriksaan
2. Keterangan kekayaan
3. Keterangan rekening
4. Keterangan palsu
5. Identitas pelapor



PAHAMI BEDANYA

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat tanam budi
- Tidak membutuhkan kesepakatan



Contoh:

Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

SUAP

- Ada kesepakatan
- Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup



Contoh:

Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek

PEMERASAN

- Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kuasa



Contoh:

Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut

Hal-hal terkait TIPIKOR



1. Dilaksanakan ***bersama-sama beberapa orang***: (siap-siap kalau salah satu sudah diproses, maka akan berlanjut ke pelaku-pelaku lainnya).
 - a. Pembuat (**DADER**), diatur dalam pasal 55 KUHP, yaitu:
 - 1) **Pelaku (PLEGER)**
 - 2) Yang **menyuruh melakukan (DOENPLEGER)**
 - 3) Yang **turut serta (MEDEPLEGER)**
 - 4) **Penganjur (UITLOKKER)**
 - b. Pembuat **Pembantu Kejahatan (MEDEPLICHTIGE)**, diatur dalam Pasal 56 KUHP (*membantu saat melakukan atau sebelum dilakukan*)
2. Banyak orang yang siap dan akan **MELAPORKAN** atau menjadi **SAKSI** atau membeberkan rahasia atas TIPIKOR yang **AKAN, SEDANG atau TELAH terjadi**:
 - a. Masih banyak orang yang **IDEALIS DAN TIDAK SENANG** dengan perbuatan jahat (Korupsi) misalnya bawahan atau staf, masyarakat umum, teman dsb.
 - b. Didasari berbagai macam motivasi:
 - 1) **SAKIT HATI**: karena menjadi korban pemerasan, dipindahtugaskan, tidak sesuai janji, tidak menang tender, dsb
 - 2) **IRI dan DENGKI**: karena bukan dia yang menjadi pejabat atau pemenang, tidak dapat bagian dsb
3. Masa Kadaluwarsa maksimal **18 Tahun**
4. Dll



MENGAPA **KORUPSI** TERJADI ?

(Donald R. Cressey, 1950)



(David T. Wolfe & Dana R. Hermanson, 2004)



Pressure

Opportunity

Rationalization

Capability

Tekanan dari internal (personal & Instansi) maupun eksternal

Kesempatan (sistem yang lemah)

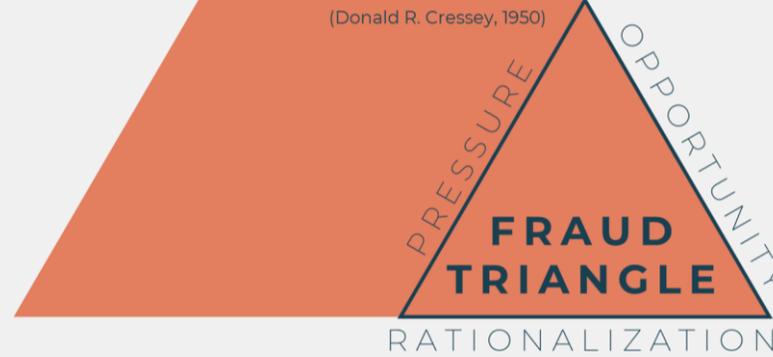
Rasionalisasi, pembenaran atas perbuatan yang dilakukan

Kemampuan (jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan atas sistem)

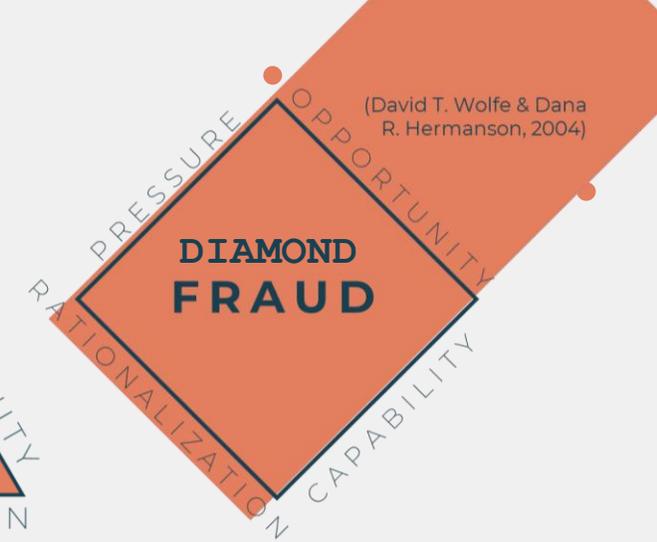
(Jonathan T Marks, CPA, 2010)



(Donald R. Cressey, 1950)



(David T. Wolfe & Dana R. Hermanson, 2004)



Capability

Kemampuan
(jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan atas sistem)

Arrogance

Sikap superioritas, angkuh, serakah, dan self-interest
(prosedur tidak berlaku untuk dirinya)

Pressure

Tekanan dari internal
(personal & perusahaan)
maupun eksternal

Opportunity

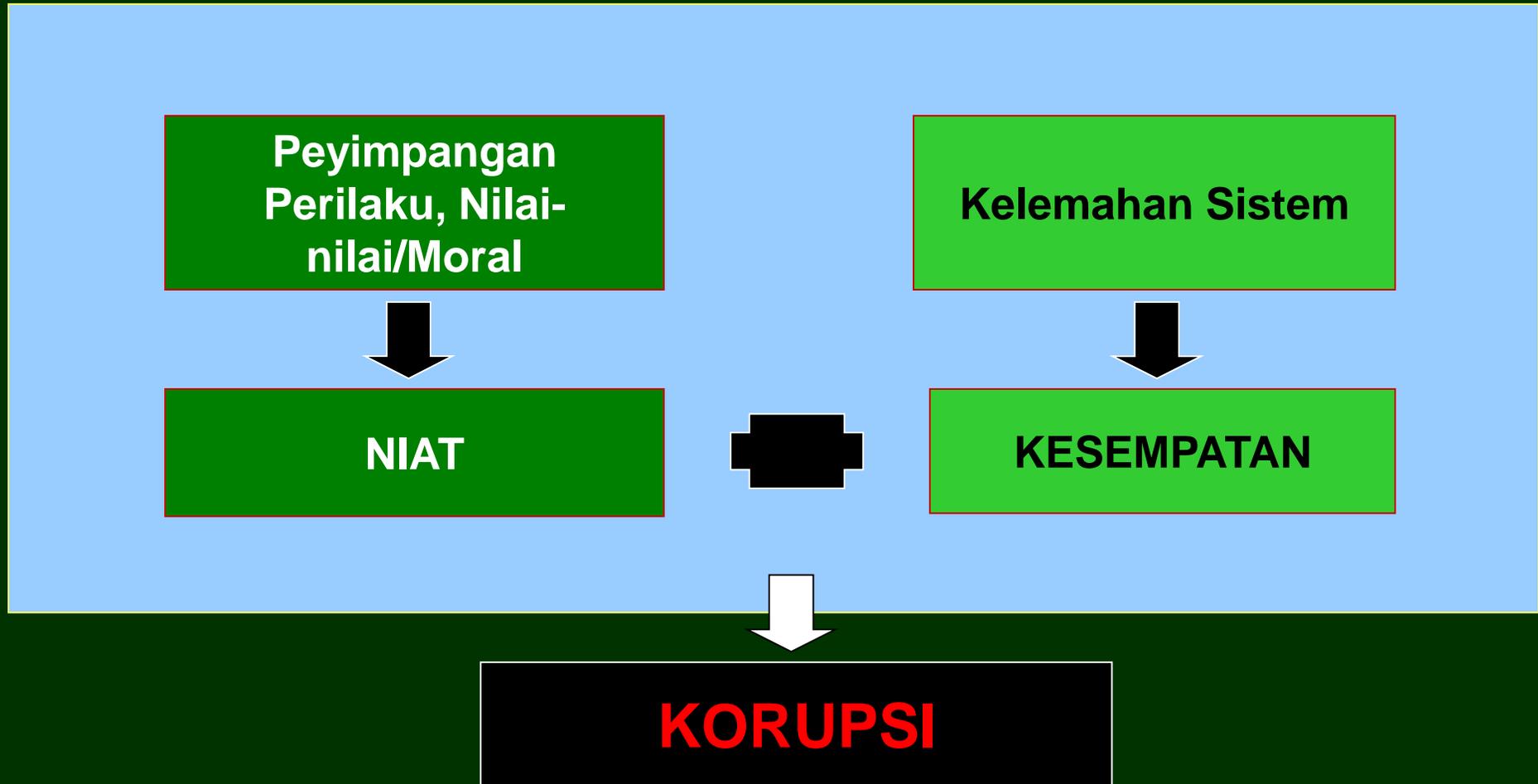
Kesempatan (sistem yang lemah)

Rationalization

Rasionalisasi, pembenaran atas perbuatan yang dilakukan



Penyebab Korupsi



MACAM KORUPSI (Berdasarkan Motif Perbuatan)

K
O
R
U
P
S
I

- Corruption by Greed
Terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi
- Corruption by Opportunities
Terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi
- Corruption by Need
Berhubungan dengan sikap mental yg tdk pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai.
- Corruption by Exposures
Berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah

SEBAB KORUPSI (Lanj..)

Lack of Integrity

SIKAP
MORAL

Integritas: Konsistensi antara tindakan dan nilai

(Teori Andrian Gostik & Dana Telford)

ETIKA



BAGAIMANA
MEMBERANTAS **KORUPSI?**

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK



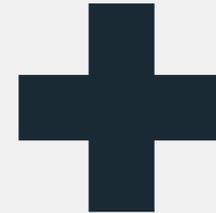
“Don’t want to corrupt”
→ BY EDUCATION
(MEMBANGUN NILAI)



“Can’t corrupt”
→ BY PREVENTION
(PERBAIKAN SISTEM)



“Dare not corrupt”
→ BY ENFORCEMENT
(EFEK JERA)



PUBLIC PARTICIPATION
(PARTISIPASI MASYARAKAT)



KEWENANGAN KPK

Sesuai Pasal 11 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK :



1

Melibatkan Aparat Penegak Hukum, **Penyelenggara Negara**, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi;

2

~~Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;~~

3

Menyangkut kerugian negara paling sedikit **Rp1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah)

BAGAIMANA PROSES PENANGANAN DUGAAN KASUS TIPIKOR?

1.



Pengaduan

Melakukan telaah dan verifikasi pengaduan dan bukti

2. Penyelidikan

Memeriksa ada tidaknya perbuatan pidana, dan memeriksa adanya pemenuhan dua alat bukti



Penyelidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

3. Penyidikan

Melakukan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP, dan dalam rangka proses penuntutan



Penyidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

4. Penuntutan



Tugas Lid Dik Tut (Pasal 11)

Dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi TPK dan Kasasi ke Mahkamah Agung

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pengaduan/ Informasi

K A S U S

KPK

PENGADILAN TIPIKOR

Kewenangan KPK (pasal 12 UU No. 30 tahun 2002)

Menyadap & merekam pembicaraan

Memerintahkan pelarangan ke luar negeri

Meminta keterangan ttg keadaan keuangan tersangka atau terdakwa

Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang terkait

Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya

Meminta data kekayaan & perpajakan tersangka

Menghentikan transaksi untuk sementara/ mencabut sementara perijinan/lisensi/ konsesi

Meminta bantuan pencarian, penyitaan, pencarian barang bukti di luar negeri

Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan

**PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
PENUNTUTAN**

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau "penyelenggara negara (UU 28/99)
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara \geq satu milyar

Segala kewenangan dalam KUHAP (UU No. 8 th. 1981) juga dimiliki oleh KPK

WEWENANG PENCEGAHAN KPK

- Pendaftaran dan Pemeriksaan (LHKPN)
- Pelaporan Gratifikasi
- Pendidikan Antikorupsi
- Sosialisasi Pemberantasan Korupsi
- Kampanye Antikorupsi
- Kerjasama dalam Pemberantasan Korupsi
- Koordinasi dan Supervisi Pencegahan



Mengapa Pendidikan Antikorupsi



- Krisis Integritas
 - Perilaku melanggar dianggap biasa
 - Dunia pendidikan belum efektif membentuk perilaku





INTEGRITY

A hand is shown placing a wooden letter 'Y' to complete the word 'INTEGRITY' on a sandy surface. The letters are made of light-colored wood and are arranged in a line on the sand. The hand is positioned on the right side of the frame, with the index and thumb fingers holding the letter 'Y' in place. The sand is a light beige color and has some shadows cast by the letters, suggesting a light source from the upper left.

INTEGRITY IS DOING
THE RIGHT THING
EVEN NO ONE IS
WATCHING
- C.S. LEWIS



JUMAT BERSEPEDA KK



NILAI ANTIKORUPSI

Tanggung jawab

Berani

Sederhana

Mandiri

Jujur

Adil

Disiplin

Kerja keras

Peduli



APA PERAN **KITA** ?

3 Pilar Utama Pencegahan Korupsi

Aparat Pemerintah

Mendorong penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Program Pemerintah dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel



Mendorong praktik bisnis tanpa suap dan tidak memberikan gratifikasi ke aparatur negara

Sektor Swasta



Menyampaikan Informasi dan mengawasi upaya pemberantasan korupsi

Masyarakat



PERBEDAAN KONDISI



- Dinamika masyarakat berjalan lambat
- Informasi hanya hanya dpt diakses oleh pihak tertentu
- Masyarakat masih tradisional/kurang berpendidikan
- Kebutuhan seragam
- Domestic



- Perubahan sangat cepat terjadi
- Informasi sgt mudah diakses oleh semua orang
- Masyarakat sudah banyak yang terdidik
- Kebutuhan sangat heterogen
- Borderless

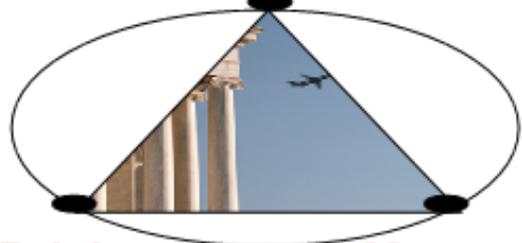
Siapa yg harus berubah ?

Bebas Korupsi

Publik yang puas & sejahtera

Seluruh komponen bangsa:

Birokrat



Pelaku Usaha

Masyarakat

Clean & Good Government

berINTEGRITAS

KOMPETEN

beKERJA KERAS

Transparan

Akuntabel

Partisipatif

Pelayanan publik yang tepat waktu, efisien, dan berkualitas.

Perubahan :

Sistem

Kultur

Attitude

Apa yg harus berubah ?



Date

3 October 2010 08:26



Date

3 October 2016 08:26

PENCEGAHAN KORUPSI & PENDIDIKAN ANTIKORUPSI



MONITORING
SISTEM

Target:
SISTEM



PELAPORAN
GRATIFIKASI



PELAPORAN
LHKPN

Target:
INDIVIDU



JEJARING PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI

SOSIALISASI & KAMPANYE
ANTIKORUPSI



PERAN SERTA
MASYARAKAT



DIKLAT
ANTIKORUPSI
(PAK & API)



Titik Rawan Korupsi di Pemerintah Daerah



KASUS KORUPSI PENYALAHGUNAAN APBD



Penyuapan Pembahasan Rancangan APBD

- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Riau
- Provinsi Jambi
- Kota Malang
- Kab Tulungagung
- Dst



Korupsi Alokasi Anggaran Wajib

- Mark up penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan. Anggaran perencanaan yang dibuat dengan kenyataan di lapangan cukup berbeda. Peralatan yang telah dibeli tidak terpakai
- Korupsi dana transfer
- Dana transfer mengendap di kas daerah



Korupsi Bantuan Pemerintah

- Korupsi Bantuan Keuangan Provinsi (Jawa Barat)
- Korupsi pengelolaan dana hibah (Jawa Timur)
- Korupsi dana bantuan sosial covid-19 (Bandung Barat)



Korupsi DPRD Kota Malang

- Diawali permintaan uang pokir dari DPRD agar pembahasan APBD-P berjalan lancar
- Walikota memerintahkan Kadis PUPPB untuk menindaklanjuti
- Kadis PUPPB mengumpulkan uang Rp700juta dari rekanan dan dibagikan kepada Anggota DPRD

PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Penanganan Perkara Korupsi Pemerintah Daerah oleh KPK Tahun 2023

GUBERNUR PAPUA

- ❑ Suap terkait proyek infrastruktur di Papua
- ❑ Gubernur Papua telah meninggal dunia sebelum menyelesaikan hukuman

- ❑ Menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat desa (SKPD) yang ada di Pemkab Kapuas termasuk dari beberapa pihak swasta
- ❑ Uang digunakan untuk membayar beberapa Lembaga Survei ketika Pilkada

28 Maret

BUPATI KAPUAS

- ❑ Proyek anggaran CCTV dan Internet Service Provider untuk layanan Bandung Smart City
- ❑ Fee pengadaan melalui e-purchasing

14 April

**WALI KOTA
BANDUNG**

6 April 2023

BUPATI MERANTI

- ❑ Pemotongan anggaran seolah-olah sebagai hutang kepada Bupati
- ❑ Penerimaan Fee jasa travel umroh
- ❑ Suap pengkondisian pemeriksaan keuangan

12 November

**PJ. BUPATI
SORONG**

- ❑ Pengkondisian temuan pemeriksaan BPK

- ❑ Penerimaan suap atas proyek-proyek di Maluku Utara
- ❑ PBJ di Basarnas

18 Desember

**GUBERNUR
MALUKU UTARA**

PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH



Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan sumberdaya yang memadai untuk dapat melaksanakan upaya pencegahan korupsi sehingga berdampak pada peningkatan integritas Pemerintah Daerah

SUMBERDAYA

- Komitmen Tinggi Pemberantasan Korupsi
- Sumberdaya Manusia yang memadai dari sisi jumlah dan kompetensi
- Anggaran
- Teknologi
- Sumberdaya lainnya

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

Pemda melaksanakan upaya pencegahan korupsi

OUTPUT

Pemda membuktikan upaya pencegahan korupsi melalui dokumen (*evidence*)

DAMPAK

Upaya pencegahan korupsi berdampak pada peningkatan integritas Pemda

Pemda menyampaikan laporan telah melaksanakan upaya pencegahan korupsi kepada KPK dengan menyampaikan *evidence* yang telah ditetapkan melalui SK Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)*

Survei Penilaian
Integritas

IPAK

KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH



Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Sistem Tata Kelola Pemerintahan



Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Layanan Publik



Penyelamatan Keuangan Daerah



Optimalisasi Peran APIP di Daerah

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Daerah melalui Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik

Pemantauan melalui Monitoring Center for Prevention:

1. Perencanaan APBD
2. Penganggaran APBD
3. Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelayanan Publik/Perizinan
5. Pengawasan APIP
6. Manajemen ASN
7. Optimalisasi Pajak Daerah
8. Pengelolaan BMD

Peningkatan hasil skor Survei Penilaian Integritas Pemda

Sertifikasi BMD

Penertiban dan Penyelamatan BMD

Penagihan Tunggakan Pajak Daerah

- Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP
- Pelaksanaan Reviu/ Audit Tata Kelola Pemerintahan

UKURAN OUTPUT DAN OUTCOME TERKAIT ANTI KORUPSI



MCP
Monitoring Center for Prevention



SPI
Survey Penilaian Integritas



IPAK
Indeks Perilaku Antikorupsi



MONITORING CENTER FOR PREVENTION



UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH

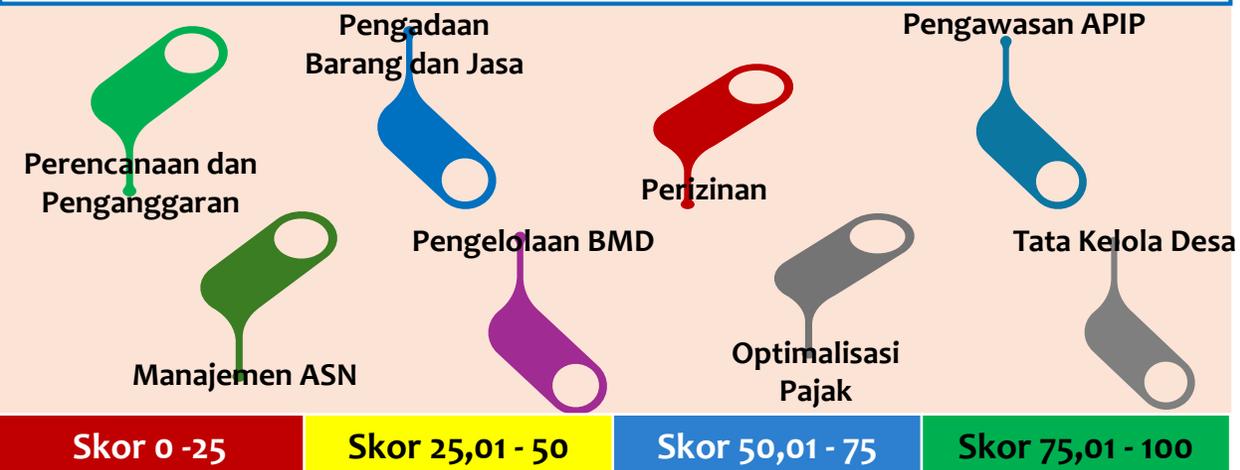


Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui **Monitoring Center for Prevention (MCP)** yang dapat diakses melalui JAGA.ID.

Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh **KPK, Kemendagri, dan BPKP** dengan jangka waktu setiap tahun

MCP mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik daerah melalui **8 Fokus Area** dilengkapi dengan Indikator dan Subindikator yang dilakukan evaluasi setiap tahun.

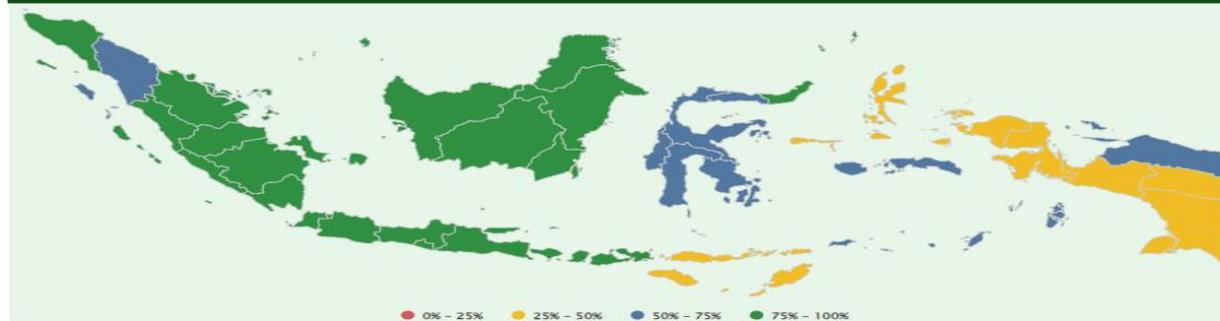
Skor MCP merupakan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah



- ❑ MCP mendorong pencegahan korupsi baik **GRAND CORRUPTION** maupun **PETTY CORRUPTION**
- ❑ MCP merupakan input dalam pencegahan korupsi, diharapkan berdampak pada peningkatan integritas tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah yang akan diukur melalui Survei Penilaian Integritas

CAPAIAN MCP 2023

Sedikit mengalami penurunan (1 poin) dibandingkan tahun 2022 (76)



Total Nilai Capaian Nasional

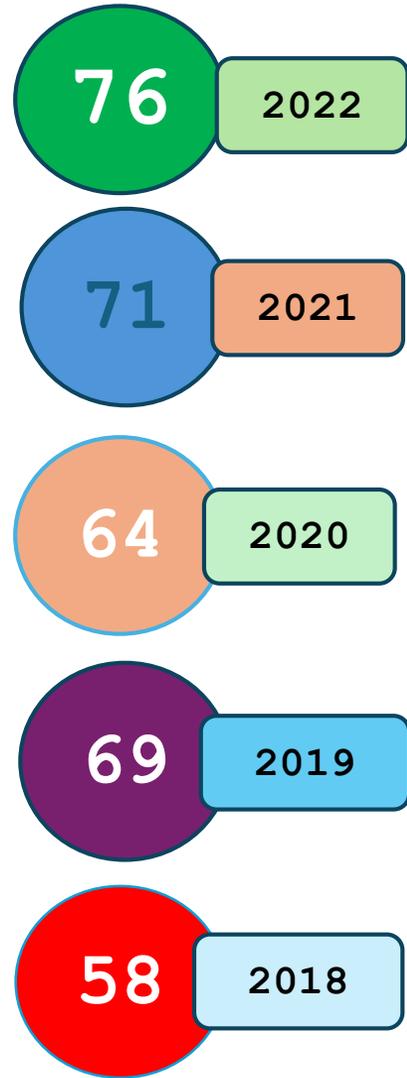
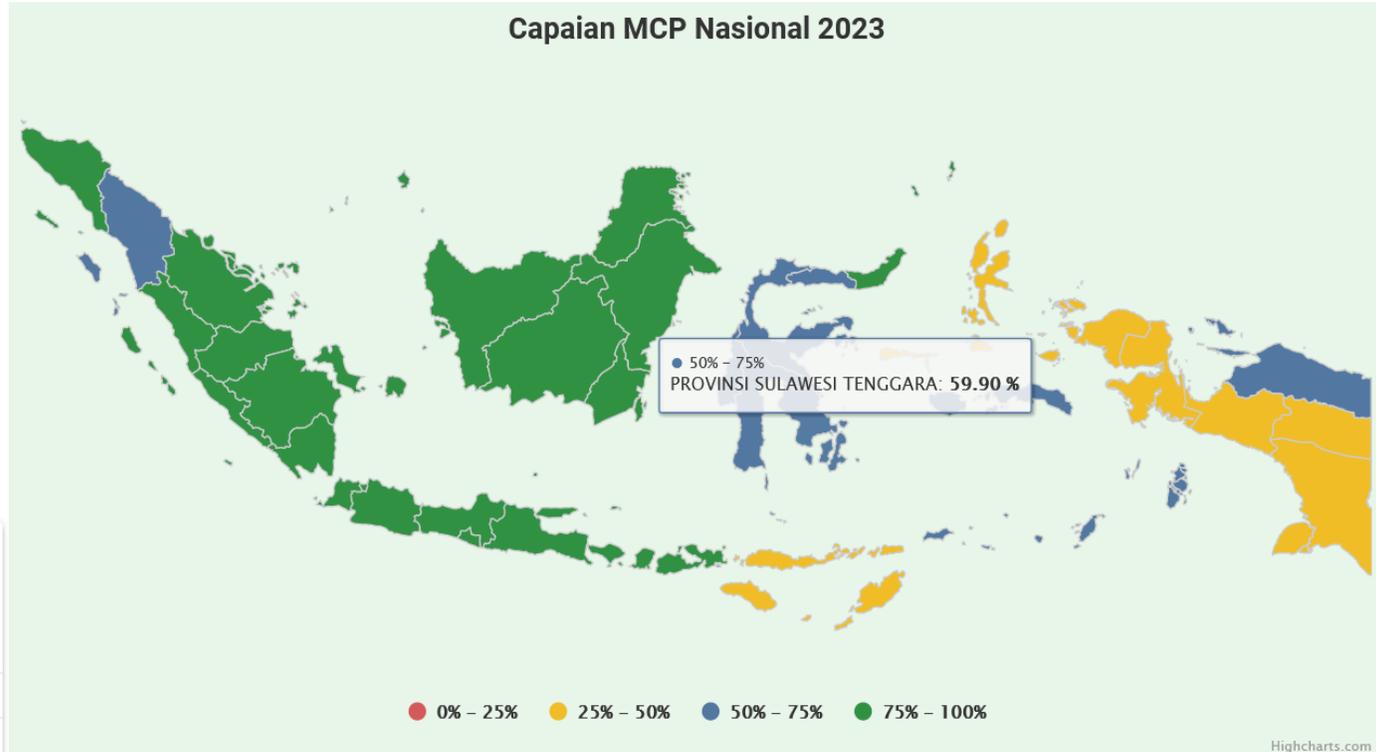


AREA INTERVENSI	INDEKS
Perencanaan dan Penganggaran	80
Pengadaan Barang dan Jasa	77
Perizinan	76
Pengawasan APIP	70
Manajemen ASN	69
Pengelolaan BMD	79
Optimalisasi Pajak Daerah	75

MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)

2023

Total Nilai Capaian Nasional



Peringkat Instansi

Cari Wilayah

No ↑	Nama Instansi	Indeks
1	Pemerintah Provinsi Bali	98
2	Pemerintah Kota Semarang	98
3	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	98
4	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	98
5	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	97
6	Pemerintah Kota Denpasar	97
7	Pemerintah Kota Surabaya	97
8	Pemerintah Kabupaten Badung	97
9	Pemerintah Kota Banda Aceh	96
10	Pemerintah Kota Blitar	96

Progres Keberhasilan Nasional



<https://jaga.id/korwil/dashboard-e->

INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR MCP 2024

AREA

8

INDIKATOR

26

SUBINDIKATOR

62

4

1

AREA	2023		2024	
	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	INDIKATOR	SUBINDIKATOR
Perencanaan APBD	4	9	1	2
Penganggaran APBD			4	8
Pengadaan Barang dan Jasa	3	9	3	6
Pelayanan Publik	4	8	4	11
Pengawasan APIP	3	9	4	10
Manajemen ASN	3	8	3	9
Optimalisasi Pajak Daerah	3	7	3	7
Pengelolaan BMD	4	7	4	9

- Area Perencanaan dan Penganggaran dipisahkan
- Perizinan dikembangkan ke Pelayanan Publik
- Tata Kelola Desa tidak masuk dalam area MCP 2024
- Penajaman indikator MCP sehingga berdampak pada IPAK dan SPI

PEMBARUAN SUBSTANSI MCP 2024

Perencanaan

Pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah, bansos, pokir

Penganggaran

Pendalaman pada implementasi SHS dan ASB untuk mencegah terjadinya *mark up* anggaran

Pengadaan Barang dan Jasa

Pendalaman pada pelaksanaan pengawasan terhadap proyek strategis daerah sehingga mendorong ketepatan waktu dan kesesuaian spesifikasi dengan standar

Pelayanan Publik

- ❑ Pelayanan publik mencakup sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan
- ❑ Dialog layanan publik
- ❑ TL Pengaduan Layanan Publik dalam rangka pemenuhan ekspektasi masyarakat

MCP 2024

Pengawasan APJP

- ❑ Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI dan Perbaikan Layanan Publik
- ❑ Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat untuk mendorong pencegahan korupsi
- ❑ Sosialisasi antikorupsi dengan melibatkan PAKSI

Manajemen ASN

Pendidikan Antikorupsi untuk mendorong implementasi Budaya Antikorupsi

Pengelolaan BMD

- ❑ Sinergi dengan substansi pada Indeks BMD
- ❑ Mendorong pemanfaatan BMD
- ❑ TL Temuan LHP terkait BMD

Optimalisasi Pajak

Kemudahan dan pencegahan korupsi dalam pembayaran pajak

PROGRESS MCP 2024 WILAYAH JAWA BARAT

MCP 2024

Semua

Semua Provisi

Jawa Barat

No ↑	Instansi	Provinsi	Tim	Total	Perencanaan	Penganggaran	Pengadaan Barang dan Jasa	Pelayanan Publik	Pengawasan APIP	Manajemen ASN	Pengelolaan BMD	Optimalisasi Pajak
7	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	Nasional	35.10	74.00	57.80	0.00	0.00	21.15	51.02	30.31	47.22
28	Pemerintah Kota Bandung	Jawa Barat	Nasional	27.21	58.40	26.20	9.37	7.04	47.53	14.98	3.81	50.96
30	Pemerintah Kota Banjar	Jawa Barat	Nasional	27.04	74.00	25.00	56.22	45.53	0.00	0.00	7.88	0.00
39	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Nasional	24.83	15.60	51.40	34.52	27.07	50.04	2.48	15.13	0.00
49	Pemerintah Kabupaten Bogor	Jawa Barat	Nasional	22.30	74.00	25.00	5.37	0.00	29.42	0.00	4.31	39.07
55	Pemerintah Kota Bogor	Jawa Barat	Nasional	21.30	26.00	25.00	0.00	14.78	43.33	32.49	6.25	24.20
57	Pemerintah Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	Nasional	20.92	15.60	33.75	19.38	0.00	31.15	0.00	22.75	45.94
60	Pemerintah Kabupaten Subang	Jawa Barat	Nasional	20.62	26.00	25.00	7.51	0.00	36.24	0.00	3.88	68.35
70	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	Nasional	19.13	26.00	25.00	1.16	0.00	37.14	11.70	5.94	48.13
85	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	Nasional	17.28	30.40	25.00	5.85	0.00	22.57	0.00	13.75	41.32
96	Pemerintah Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	Nasional	16.21	26.00	35.00	0.65	0.00	23.43	0.00	0.00	44.87
103	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	Nasional	15.20	10.40	37.50	1.12	0.00	33.29	0.00	8.13	32.15
115	Pemerintah Kota Bekasi	Jawa Barat	Nasional	14.77	15.60	42.70	2.45	14.89	0.00	34.89	6.25	0.00
140	Pemerintah Kabupaten Bandung	Jawa Barat	Nasional	12.93	50.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88	0.00
143	Pemerintah Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	Nasional	12.67	20.40	25.00	20.04	0.00	15.35	0.00	10.06	9.25
150	Pemerintah Kota Cimahi	Jawa Barat	Nasional	12.14	26.00	25.00	0.00	29.14	0.00	5.78	8.56	0.00
162	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	Nasional	11.53	0.00	25.00	20.07	0.00	29.81	0.00	8.19	9.25
264	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	Nasional	7.16	39.20	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
302	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	Nasional	6.03	0.00	25.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Pemerintah Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	Nasional	5.02	0.00	27.60	3.57	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
334	Pemerintah Kota Depok	Jawa Barat	Nasional	4.66	0.00	26.30	4.62	3.19	0.00	0.00	1.88	0.00
343	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	Nasional	4.44	0.00	25.00	3.43	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00
356	Pemerintah Kota Cirebon	Jawa Barat	Nasional	3.91	0.00	27.60	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	Nasional	3.24	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00
406	Pemerintah Kabupaten Karawang	Jawa Barat	Nasional	2.25	0.00	0.00	1.12	0.00	8.30	0.00	0.00	9.25
430	Pemerintah Kabupaten Garut	Jawa Barat	Nasional	1.39	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00
455	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	Nasional	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
519	Pemerintah Kota Sukabumi	Jawa Barat	Nasional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

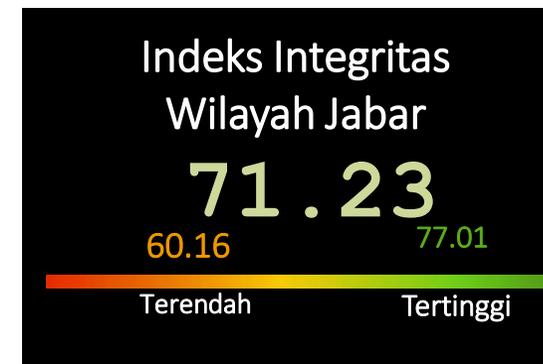
CAPAIAN MCP TAHUN 2023 WILAYAH JAWA BARAT (1)

No ↑	Instansi	Provinsi	Tim	Total Seluruh Area Intervensi	Perencanaan dan Penganggaran APBD	Pengadaan Barang dan Jasa	Perizinan	Pengawasan APIP	Manajemen ASN	Optimalisasi Pajak Daerah	Pengelolaan BMD
3	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	97.62	100.00	100.00	100.00	95.60	98.91	95.76	92.75
24	Pemerintah Kota Bekasi	Jawa Barat	Jawa Barat	94.26	96.88	96.91	100.00	92.51	99.46	89.17	84.54
72	Pemerintah Kota Sukabumi	Jawa Barat	Jawa Barat	91.73	99.88	94.53	87.00	91.20	90.66	90.58	87.50
79	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	Jawa Barat	91.50	100.00	93.04	80.67	92.37	98.91	89.21	85.58
81	Pemerintah Kabupaten Bandung	Jawa Barat	Jawa Barat	91.47	91.88	76.82	100.00	96.04	100.00	89.18	87.40
140	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	Jawa Barat	89.15	95.00	88.26	83.10	93.53	90.66	82.64	90.54
145	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	Jawa Barat	88.90	92.50	84.20	99.15	87.97	86.41	88.71	83.46
156	Pemerintah Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	Jawa Barat	88.35	98.76	91.86	93.50	90.21	84.78	80.44	77.88
183	Pemerintah Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	Jawa Barat	87.37	92.13	85.76	74.05	89.50	90.66	90.78	88.50
194	Pemerintah Kota Depok	Jawa Barat	Jawa Barat	86.72	93.75	94.75	87.00	88.94	79.89	78.24	83.36
198	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	Jawa Barat	86.56	91.75	88.25	81.13	81.95	85.88	92.12	84.38
199	Pemerintah Kota Banjar	Jawa Barat	Jawa Barat	86.38	98.75	87.75	76.60	87.07	79.99	90.45	83.06
201	Pemerintah Kabupaten Karawang	Jawa Barat	Jawa Barat	86.24	96.25	66.55	87.05	80.75	93.47	90.27	90.01
205	Pemerintah Kabupaten Subang	Jawa Barat	Jawa Barat	86.13	98.75	80.97	77.90	87.77	86.12	89.82	81.06
215	Pemerintah Kota Bogor	Jawa Barat	Jawa Barat	85.53	90.00	96.82	71.55	82.37	100.00	79.54	77.31

CAPAIAN MCP WILAYAH JAWA BARAT

No	Pemerintah Daerah	MCP 2023	MCP 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	MCP 2021	MCP 2020
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	97,62	98,23	(0,61)	94,54	91,80
2	Pemerintah Kota Bekasi	94,26	87,69	6,57	86,05	86,82
3	Pemerintah Kota Sukabumi	91,73	92,70	(0,97)	84,93	53,01
4	Pemerintah Kabupaten Sumedang	91,50	95,45	(3,95)	87,76	77,41
5	Pemerintah Kabupaten Bandung	91,47	94,79	(3,32)	76,98	77,94
6	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	89,15	90,64	(1,49)	74,12	80,21
7	Pemerintah Kabupaten Cirebon	88,90	91,06	(2,16)	72,70	72,15
8	Pemerintah Kabupaten Majalengka	88,35	92,53	(4,18)	82,36	71,26
9	Pemerintah Kabupaten Cianjur	87,37	82,55	4,82	59,95	67,41
10	Pemerintah Kota Depok	86,72	88,33	(1,61)	81,59	79,71
11	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	86,56	91,70	(5,14)	81,52	62,72
12	Pemerintah Kota Banjar	86,38	91,77	(5,39)	77,98	66,26
13	Pemerintah Kabupaten Karawang	86,24	90,72	(4,48)	62,95	61,77
14	Pemerintah Kabupaten Subang	86,13	86,31	(0,18)	64,04	66,66
15	Pemerintah Kota Bogor	85,53	92,65	(7,12)	76,31	76,18
16	Pemerintah Kota Tasikmalaya	85,31	82,17	3,14	57,70	60,32
17	Pemerintah Kota Cimahi	85,20	87,57	(2,37)	70,27	69,16
18	Pemerintah Kabupaten Garut	83,17	91,67	(8,50)	85,15	77,04
19	Pemerintah Kota Cirebon	83,10	85,26	(2,16)	76,09	69,31
20	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	83,07	93,70	(10,63)	55,60	60,94
21	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	82,86	87,83	(4,97)	54,14	54,33
22	Pemerintah Kota Bandung	81,93	91,82	(9,89)	83,22	87,16
23	Pemerintah Kabupaten Kuningan	81,10	91,30	(10,20)	88,50	78,06
24	Pemerintah Kabupaten Indramayu	79,76	84,16	(4,40)	82,75	79,17
25	Pemerintah Kabupaten Bekasi	78,30	86,00	(7,70)	63,67	63,19
26	Pemerintah Kabupaten Ciamis	77,40	89,52	(12,12)	60,65	62,98
27	Pemerintah Kabupaten Bogor	75,03	86,19	(11,16)	85,02	75,23
28	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	73,84	85,21	(11,37)	73,81	63,28

No	Nama Instansi	Indeks SPI 2023	Indeks Internal	Indeks Eksternal	Indeks Eksper
1	Kota Sukabumi	77,01	79,21	89,08	73,07
2	Kota Bogor	76,18	80,22	86,52	69,79
3	Kabupaten Majalengka	76,14	77,54	82,41	77,59
4	Kabupaten Sumedang	75,14	77,73	88,63	66,22
5	Kabupaten Ciamis	74,78	81,56	85,09	72,71
6	Kota Banjar	74,65	80,46	87,20	65,51
7	Kota Tasikmalaya	73,70	78,07	84,27	66,01
8	Kabupaten Bandung	73,66	78,69	85,94	64,99
9	Kota Cimahi	73,62	81,96	85,21	70,19
10	Kota Depok	73,53	78,39	84,82	65,48
11	Kabupaten Karawang	73,33	76,51	83,59	70,38
12	Kabupaten Tasikmalaya	72,75	76,41	82,06	66,35
13	Kabupaten Kuningan	72,16	73,23	81,44	68,02
14	Kabupaten Sukabumi	71,90	79,19	84,58	66,30
15	Kabupaten Pangandaran	71,85	77,22	85,03	63,37
16	Kabupaten Indramayu	70,63	78,39	82,14	65,01
17	Kabupaten Purwakarta	70,06	80,15	83,17	58,33
18	Provinsi Jawa Barat	69,60	80,77	85,72	68,28
19	Kabupaten Bogor	69,44	77,68	81,20	56,65
20	Kabupaten Cianjur	69,43	77,70	81,33	59,17
21	Kabupaten Subang	69,00	76,53	82,17	57,92
22	Kota Cirebon	68,72	77,11	80,79	61,98
23	Kota Bekasi	68,26	76,34	79,59	67,19
24	Kabupaten Bekasi	68,04	77,71	81,32	57,28
25	Kabupaten Cirebon	67,70	76,55	80,52	58,03
26	Kabupaten Garut	67,43	77,14	82,36	52,45
27	Kota Bandung	65,49	79,48	84,34	61,16
28	Kabupaten Bandung Barat	60,16	70,52	83,39	63,30



Keterangan :

- : Di atas rata-rata Nasional
- : Di bawah rata-rata Jawa Barat dan Nasional

INDEKS SPI PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH JAWA BARAT

NO	PEMERINTAH DAERAH	SPI 2023	SPI 2022	Selisih
1	Kota Sukabumi	77,01	72,60	4,41
2	Kota Bogor	76,18	73,06	3,12
3	Kabupaten Majalengka	76,14	72,76	3,38
4	Kabupaten Sumedang	75,14	77,02	(1,88)
5	Kabupaten Ciamis	74,78	67,74	7,04
6	Kota Banjar	74,65	75,18	(0,53)
7	Kota Tasikmalaya	73,70	73,96	(0,26)
8	Kabupaten Bandung	73,66	67,49	6,17
9	Kota Cimahi	73,62	72,22	1,40
10	Kota Depok	73,53	73,21	0,32
11	Kabupaten Karawang	73,33	66,31	7,02
12	Kabupaten Tasikmalaya	72,75	68,29	4,46
13	Kabupaten Kuningan	72,16	74,20	(2,04)
14	Kabupaten Sukabumi	71,90	67,86	4,04

NO	PEMERINTAH DAERAH	SPI 2023	SPI 2022	Selisih
15	Kabupaten Pangandaran	71,85	71,77	0,08
16	Kabupaten Indramayu	70,63	65,04	5,59
17	Kabupaten Purwakarta	70,06	71,86	(1,80)
18	Provinsi Jawa Barat	69,60	75,67	(6,07)
19	Kabupaten Bogor	69,44	64,27	5,17
20	Kabupaten Cianjur	69,43	66,89	2,54
21	Kabupaten Subang	69,00	66,34	2,66
22	Kota Cirebon	68,72	73,55	(4,83)
23	Kota Bekasi	68,26	69,58	(1,32)
24	Kabupaten Bekasi	68,04	67,95	0,09
25	Kabupaten Cirebon	67,70	64,99	2,71
26	Kabupaten Garut	67,43	69,57	(2,14)
27	Kota Bandung	65,49	72,62	(7,13)
28	Kabupaten Bandung Barat	60,16	68,08	(7,92)

INDEKS SPI 2023

Seluruh Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah

KATEGORI PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT

Nama Instansi	2022	2023
Provinsi Jawa Barat	75,67	69,60
Kabupaten Bogor	64,27	69,44
Kabupaten Sukabumi	67,86	71,90
Kabupaten Cianjur	66,89	69,43
Kabupaten Bandung	67,49	73,66
Kabupaten Garut	69,57	67,43
Kabupaten Tasikmalaya	68,29	72,75
Kabupaten Ciamis	67,74	74,78
Kabupaten Kuningan	74,20	72,16
Kabupaten Cirebon	64,99	67,70
Kabupaten Majalengka	72,76	76,14
Kabupaten Sumedang	77,02	75,14
Kabupaten Indramayu	65,04	70,63
Kabupaten Subang	66,34	69,00
Kabupaten Purwakarta	71,86	70,06

JAWA BARAT

Nama Instansi	2022	2023
Kabupaten Karawang	66,31	73,33
Kabupaten Bekasi	67,95	68,04
Kabupaten Bandung Barat	68,08	60,16
Kabupaten Pangandaran	71,77	71,85
Kota Bogor	73,06	76,18
Kota Sukabumi	72,60	77,01
Kota Bandung	72,62	65,49
Kota Cirebon	73,55	68,72
Kota Bekasi	69,58	68,26
Kota Depok	73,21	73,53
Kota Cimahi	72,22	73,62
Kota Tasikmalaya	73,96	73,70
Kota Banjar	75,18	74,65

**MCP TAHUN 2023
Vs
INDEKS SPI TAHUN
2023 WILAYAH
JAWA BARAT**

NO	PEMERINTAH DAERAH	MCP 2023	SPI 2023	Selisih
1	Provinsi Jawa Barat	97,62	69,60	28,02
2	Kota Bekasi	94,26	68,26	26,00
3	Kota Sukabumi	91,73	77,01	14,72
4	Kabupaten Sumedang	91,50	75,14	16,36
5	Kabupaten Bandung	91,47	73,66	17,81
6	Kabupaten Purwakarta	89,15	70,06	19,09
7	Kabupaten Cirebon	88,90	67,70	21,20
8	Kabupaten Majalengka	88,35	76,14	12,21
9	Kabupaten Cianjur	87,37	69,43	17,94
10	Kota Depok	86,72	73,53	13,19
11	Kabupaten Sukabumi	86,56	71,90	14,66
12	Kota Banjar	86,38	74,65	11,73
13	Kabupaten Karawang	86,24	73,33	12,91
14	Kabupaten Subang	86,13	69,00	17,13
15	Kota Bogor	85,53	76,18	9,35
16	Kota Tasikmalaya	85,31	73,70	11,61
17	Kota Cimahi	85,20	73,62	11,58
18	Kabupaten Garut	83,17	67,43	15,74
19	Kota Cirebon	83,10	68,72	14,38
20	Kabupaten Pangandaran	83,07	71,85	11,22
21	Kabupaten Tasikmalaya	82,86	72,75	10,11
22	Kota Bandung	81,93	65,49	16,44
23	Kabupaten Kuningan	81,10	72,16	8,94
24	Kabupaten Indramayu	79,76	70,63	9,13
25	Kabupaten Bekasi	78,30	68,04	10,26
26	Kabupaten Ciamis	77,40	74,78	2,62
27	Kabupaten Bogor	75,03	69,44	5,59
28	Kabupaten Bandung Barat	73,84	60,16	13,68

BIASAKAN YANG BENAR

Play (k)



0:02 / 3:19



semua



ber-AKS!



Siapapun Anda...
Apapun pekerjaan
anda...
Dimanapun anda
berada...
Berapapun usia
anda...

Perilaku **ANTIKORUPSI**
harus menjadi sebuah **BUDAYA**



Semua **B**  **sa**

Berantas Korups 



HATUR NUHUN TERIMA KASIH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jln. Kuningan Persada Kav - 4 Jakarta 12920
Telp: (021) 2557 8300

dani.rustandi@kpk.go.id

081284879652



Media Sosial KPK

TERIMAKASIH



Twitter: @KPK_RI



Instagram: @official.kpk

- **Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:**
Direktorat Pengaduan Masyarakat
- PO BOX 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
Email: pengaduan@kpk.go.id
- **Pelaporan Gratifikasi:**
- Direktorat Gratifikasi
Telp: (021) 2557 8440
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- **Pelayanan Informasi Publik**
- Hubungan Masyarakat:
Telp: (021) 2557 8498
Faks: (021) 5290 5592
Email: informasi@kpk.go.id
- **Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):**
- Direktorat LHKPN
Telp: (021) 2557 8396
Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id